

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sejak reformasi politik di Indonesia pada tahun 1998, Indonesia menerapkan sistem politik demokratis. Yang terjadi sejak saat itu, kompetisi antarkekuatan politik dan tumbuhnya partisipasi politik publik serta kebebasan warga dalam mengemukakan pendapat. Sistem politik demokratis berasal dari dua kata dalam Yunani, yaitu *demos* dan *kratos*. *Demos* memiliki arti rakyat sementara *kratos* berarti pemerintahan. Pemerintahan demokrasi sering diartikan sebagai pemerintahan melibatkan rakyat banyak. Demokrasi memiliki makna sebagai “pemerintahan oleh dan untuk rakyat” yang pada perkembangannya tetap menerapkan prinsip perwakilan (Sparingga, 2009:h.16). Pemerintahan ini membebaskan rakyat untuk memilih pemimpinnya melalui pemilihan umum (Pemilu) presiden, termasuk juga memilih perwakilan rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui pemilu legislatif.

Dewan Perwakilan Rakyat merupakan salah satu lembaga negara yang berperan mewakili suara rakyat di parlemen. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Fungsi DPR ialah menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas), menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU), menerima dan membahas RUU yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Presiden, serta menyetujui peraturan pemerintah pengganti UU (yang diajukan Presiden) (Sugiman, 2020:h.177). Dengan banyaknya fungsi penting tersebut, lembaga DPR memiliki kehormatan tersendiri di mata publik.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia sebagai lembaga legislatif selalu mendapat sorotan publik. Anggota DPR sudah seharusnya lebih berhati-hati dalam berkomentar di ranah publik. Berbanding terbalik, beberapa anggota DPR kerap membuat gempar media sosial melalui pernyataan yang diunggah di media sosial.

Salah satu sorotan publik terhadap lembaga DPR terjadi pada tahun 2020 silam ketika pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yang mendapat banyak penolakan dari masyarakat. Mu'ti, dalam wawancara melalui media daring aktualitas.id (23/09/20) mengatakan bahwa pembahasan mengenai rancangan undang-undang (RUU) Cipta Kerja yang sedang dilakukan oleh DPR berpotensi menimbulkan kegaduhan di tengah pandemi virus Covid-19. Hal ini menyebabkan banyaknya kesalahpahaman serta perselisihan di media sosial, seperti munculnya hoaks, pertikaian antar pendukung partai politik, dan kecemasan di masyarakat.

Contoh lain dari kegaduhan yang ditimbulkan terjadi lagi pada tahun 2021. Salah satu anggota DPR RI fraksi PDIP, Krisdayanti, melalui kanal Youtube Akbar Faizal *Uncensored* membeberkan besaran gaji yang diterima oleh anggota DPR. Krisdayanti mengatakan jika gaji pokok yang diterima olehnya mencapai Rp.16 juta rupiah dalam sebulan, gaji tersebut belum termasuk gaji tunjangan pekerjaannya sebesar Rp.59 juta rupiah. Tidak hanya itu, masih ada dana aspirasi yang akan diterima oleh setiap anggota DPR sebanyak lima kali tiap tahunnya, dana kunjungan daerah pemilihan (dapil) sebesar Rp.140 juta tiap kunjungan selama delapan kali dalam setahun. Kabar ini sontak membuat kegaduhan di tengah kondisi krisis pandemi Covid-19 yang terjadi sejak tahun 2020.

Komentar dari warganet terus berdatangan. Tak sedikit yang mendukung sikap Krisdayanti karena telah memberikan transparansi gaji DPR kepada rakyat. Namun, ada pendapat jika apa yang telah dikatakan oleh Krisdayanti dalam video wawancara tersebut (menit 30:16) merupakan omong kosong belaka, tak sedikit yang mempertanyakan hasil kerja Krisdayanti untuk rakyat, dan masih banyak komentar negatif lainnya.

Berbagai macam bentuk komentar tersebut merupakan cerminan cara pandang warganet terhadap lembaga DPR. Setiap individu memiliki cara pandang untuk mengekspresikan pemikiran dalam bentuk tulisan secara berbeda. Cara pandang ini dalam ranah psikologi disebut dengan persepsi.

Persepsi merupakan cara pandang manusia dalam melihat dunia. Démuth (2013:h.23) menjelaskan bahwa persepsi memiliki dua tahapan, yaitu tahapan

bawah atau *bottom up processing* dan tahapan atas atau *top-down processing*. Tahapan bawah merupakan tahap dimana indra manusia menerima input sensorik berupa suara, visual, wewangian, rasa, sentuhan, dan sebagainya. Tahapan atas merupakan kelanjutan dari tahapan bawah, di tahap ini, hasil dari input sensorik akan diproses oleh otak lalu digabungkan dengan pengetahuan, pengalaman, serta pemikiran individu yang kemudian dikaitkan dengan kejadian yang sedang berlangsung.

Banyaknya pernyataan anggota DPR yang mendapat sorotan publik membuat DPR ramai diperbincangkan oleh warganet. Perbincangan ini tak jarang membuat media sosial Twitter ramai dengan tagar tertentu, seperti tagar #DPRMenginjakRakyat yang menjadi *Trending Topic* pada bulan Juni 2022 silam.

Melihat kedua contoh kasus di atas, peneliti beranggapan bahwa penelitian ini menarik untuk dilakukan. Komentar-komentar ini mewakili persepsi pengguna media sosial yang merupakan warga negara Indonesia. Tak jarang akun yang digunakan merupakan akun anonim atau akun yang tidak merepresentasikan identitas pemiliknya.

Penelitian ini terfokus pada tanggapan warganet terhadap DPR di cuitan populer Twitter dengan kata kunci “DPR” dalam rentang waktu 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022. Pemilihan data cuitan didasari pertimbangan apakah pernyataan tersebut menyangkut kepentingan kehidupan orang banyak.

Penelitian terdahulu mengenai Persepsi Warganet Terhadap Lembaga DPR dalam Kolom Tanggapan di Media Sosial Twitter belum ditemukan. Peneliti menemukan penelitian yang serupa, penelitian tersebut berjudul (1) Bahasa Sarkasme Warganet dalam Komentar Akun Instagram Puan Maharani dan DPR RI, (2) Penggunaan Makian Bahasa Indonesia Pada Kolom Komentar Akun Instagram Lambe Turah (Kajian Sociolinguistik), dan (3) Penggunaan Makian Pada Kolom Komentar Akun Tiktok Denise Chariesta.

Perlu dikaji kembali mengapa pernyataan anggota DPR dapat membuat kegaduhan di media sosial.

## 1.2 Masalah Penelitian

Dari uraian latar belakang yang ada, masalah utama dalam penelitian ini adalah banyaknya komentar warganet yang tertuju pada anggota DPR dalam cuitan populer Twitter. Permasalahan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- (1) Bagaimana persepsi warganet terhadap lembaga DPR di media sosial Twitter?
- (2) Bagaimana fungsi implikatur dalam kolom tanggapan warganet terhadap DPR di media sosial Twitter?

## 1.3 Batasan Masalah

Luasnya cakupan masalah dalam identifikasi permasalahan di atas membuat peneliti membatasi ruang lingkup penelitian ini hanya terkait cuitan yang mengandung kata kunci “DPR”. Cuitan populer/viral terkait dengan pernyataan dan tanggapan dari anggota DPR dalam rentang waktu 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022. Memilih cuitan yang mengundang perhatian publik, data tanggapan berasal dari cuitan dengan jumlah minimal 200 tanggapan, serta pengambilan data tanggapan warganet berasal hanya dari akun personal bukan akun robot (akun otomatis).

## 1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengetahui hal berikut:

- (1) Persepsi warganet terhadap lembaga DPR di media sosial Twitter.
- (2) Bentuk tanggapan yang sering diterima oleh DPR di media sosial Twitter

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, dapat diketahui bagaimana persepsi warganet terhadap pernyataan anggota DPR yang dimuat di media sosial Twitter.

Manfaat penelitian ini secara teoretis diharapkan dapat memberikan sumbangsih analisis dalam perkembangan disiplin ilmu Pragmatik. Manfaat praktis yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah memberikan gambaran mengenai persepsi warganet terhadap lembaga DPR di media sosial Twitter, memberikan kritik kepada anggota DPR sehingga dapat memperbaiki citra lembaga DPR pada masa mendatang.

### **1.6 Definisi Operasional**

Definisi operasional menjelaskan istilah-istilah yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- (1) Tanggapan warganet merupakan bentuk ekspresif dari pemikiran warga internet, yaitu orang yang aktif dalam menggunakan internet, dalam hal ini tanggapan di media sosial twitter.
- (2) Lembaga DPR ialah lembaga tinggi negara yang terdiri atas anggota partai politik yang dipilih melalui pemilihan umum. DPR merupakan singkatan dari Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Kolom tanggapan merupakan kolom dalam media sosial Twitter yang berisikan komentar ekspresif warganet terhadap postingan terkait.

### 1.7 Struktur Organisasi Skripsi

Pembuatan skripsi ini ditulis secara sistematis dimulai dari BAB I hingga BAB V. Penulisan seperti ini untuk mempermudah tercapainya tujuan penelitian ini. Berikut sistematika penulisan skripsi lebih lengkap.

BAB I, **Pendahuluan**, terdapat latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi. Lanjut ke BAB II, **Kajian Pustaka**, dalam bab ini diuraikan teori penelitian terkait dan menjelaskan lebih dalam fenomena penelitian yang diteliti. Lanjut ke BAB III, yaitu **Metode Penelitian**, bab ini menguraikan pendekatan penelitian, pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV diisi oleh **Temuan dan Pembahasan**, bab ini menjelaskan tentang apa yang telah ditemukan beserta pembahasan lebih detail akan temuan tersebut. Dalam bab akhir yaitu BAB V, **Penutup**, bab ini akan berisi saran serta simpulan dari isi bab sebelumnya.